



PEMKOT TERIMA SERTIPIKAT TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN

Miliki Kepastian Hukum, Beri Kemanfaatan bagi Masyarakat

YOGYA (KR) - Sejak tahun 2017 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) atau Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana Kota Yogya intensif melakukan penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten. Setelah memiliki kepastian hukum dengan terbitnya sertipikat maka hal tersebut semakin memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto, mengungkapkan tanah kasultanan dan kadipaten bukan hanya sekedar aset, tetapi juga merupakan simbol dari kearifan lokal kekayaan budaya, sejarah, dan jati diri warga masyarakat. "Serah terima sertipikat tanah kasultanan dan kadipaten ini merupakan langkah konkret dalam rangka kita bersama memberikan pengakuan dan penguatan hak atas tanah yang merupakan bagian integral dari warisan budaya dan sejarah Yogya," ungkapnya dalam serah terima secara simbolis sertipikat tanah ka-

sultanan dan kadipaten di SM Tower, Rabu (21/8).

Sertipikat yang sudah dalam bentuk elektronik tersebut diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogya kepada Pemkot Yogya. Kegiatan itu sekaligus untuk memperingati 12 tahun Undang-undang Keistimewaan (UUK) serta didanai melalui dana keistimewaan.

Sugeng menambahkan pemberian sertipikat dari BPN adalah upaya untuk memberikan hak hukum bukti kepemilikan tanah dan selanjutnya guna meningkatkan harkat serta peman-

faatan tanah demi kemakmuran rakyat. "Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Gubernur Sri Hamengku Buwono X, filosofi 'manunggaling kawula lan Gusti', mengajarkan kita untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan tanah yang humanis berbasis pada prinsip-prinsip 'manunggaling pamong lan wargo', imbuhnya.

Oleh karena itu dengan tujuan tersebut serah terima sertipikat tanah harus direvisi maknanya dan didayagunakan potensi penggunaan dan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga keberadaan tanah kasultanan dan kadipaten, selain untuk keperluan bangunan publik juga bisa dimanfaatkan untuk akselerasi proses investasi.

Kepala BPN Kota Yogya Rudi Prihantoro, menjelaskan tahun ini pihaknya menyerahkan 48 sertipikat

tanah kasultanan dan kadipaten. Seluruhnya sudah dipastikan 'clear and clean' karena telah melalui serangkaian tahapan yang dilakukan oleh Dispetaru Kota Yogya mulai inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan hingga pendaftaran ke BPN Kota Yogya. "Dengan terbitnya sertipikat ini maka memiliki kepastian hukum. Tidak ada masalah di lapangan maupun yuridisnya. Proses pemanfaatannya pun menyesuaikan aturan," tandasnya.

Sementara Kepala Dispetaru Kota Yogya Wahyu Handoyo Hardjono Putro, menguraikan sertipikat tanah kasultanan dan kadipaten yang diserahkan kali ini merupakan hasil penatausahaan tahun 2023 lalu. Sejak pendataan tahun 2017 sampai saat ini, terdapat 446 bidang tanah kasultanan dan kadipaten di Kota Yogya yang berhasil diter-



KR-Ardhi Wahdan
Serah terima sertipikat tanah kasultanan dan kadipaten oleh BPN Kota Yogya kepada Pemkot Yogya.

bitkan sertipikat. Dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah maka diharapkan mampu memberikan kontribusi positif serta terwujudnya kesejahteraan bagi warga Kota Yogya.

Bidang tanah kasultanan dan kadipaten yang telah disertipikat itu antara lain

telah dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Di antaranya seperti balai serbaguna, balai rukun warga, pemakaman, blok hunian, taman, bangunan penunjang ekonomi dan sebagainya. Beberapa contoh yang mampu menjadi pembangkit ekonomi warga ialah Lembah

Code di Prawirodirjan yang dulunya kawasan kumuh kini menjadi fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat. Begitu juga Bendung Lepen Giwangan serta kawasan bantaran sungai yang sudah ditata melalui program penataan kawasan kumuh. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005